



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KP 381 TAHUN 2018

TENTANG

NOMENKLATUR DAN TITELATUR DALAM BAHASA INGGRIS
UNTUK TINGKAT ESELON I DAN ESELON II
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 189 Tahun 2015;
- b. bahwa dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyeragaman penggunaan nomenklatur dan titelatur di Lingkungan Kementerian Perhubungan dalam Bahasa Inggris sebagai bentuk pembinaan dan

pemberian dukungan administrasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Nomenklatur dan Titelatur dalam Bahasa Inggris untuk Tingkat Eselon I dan Eselon II di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8)
 6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75)
 7. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Dan Bekasi;
 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

- Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 117 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 189 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1891);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1439);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG NOMENKLATUR DAN TITELATUR DALAM BAHASA INGGRIS UNTUK TINGKAT ESELON I DAN ESELON II DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.
- DIKTUM PERTAMA : Menetapkan Nomenklatur dan Titelatur dalam Bahasa Inggris Untuk Tingkat Eselon I Dan Eselon II di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- DIKTUM KEDUA : Nomenklatur dan Titelatur dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terkait dengan bagan struktur organisasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
- DIKTUM KETIGA : Nomenklatur dan Titelatur dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dijadikan sebagai pedoman/acuan penggunaan nomenklatur dan titelatur dalam Bahasa Inggris oleh Kementerian Perhubungan.

DIKTUM KEEMPAT : Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Pusat Fasilitas Kemitraan Dan Kelembagaan Internasional bertanggungjawab dalam pengawasan pelaksanaan dan evaluasi dari Keputusan ini.

DIKTUM KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2018

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan; dan
7. Para Kepala Biro dan Para Kepala Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM


WABU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651022 199203 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KP 381 TAHUN 2018

TENTANG NOMENKLATUR DAN TITELATUR DALAM BAHASA INGGRIS
UNTUK TINGKAT ESELON I DAN ESELON II DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN

NOMENKLATUR		TITELATUR
INDONESIA	INGGRIS	
MENTERI PERHUBUNGAN	MINISTRY OF TRANSPORTATION	MINISTER FOR TRANSPORTATION
STAF AHLI MENTERI BIDANG TEKNOLOGI, LINGKUNGAN DAN ENERGI PERHUBUNGAN	OFFICE OF SENIOR ADVISOR TO THE MINISTER FOR TRANSPORTATION ON TECHNOLOGY, ENVIRONMENT AND ENERGY FOR TRANSPORTATION	SENIOR ADVISOR TO THE MINISTER FOR TRANSPORTATION ON TECHNOLOGY, ENVIRONMENT AND ENERGY OF TRANSPORTATION
STAF AHLI MENTERI BIDANG HUKUM DAN REFORMASI BIROKRASI PERHUBUNGAN	OFFICE OF SENIOR ADVISOR TO THE MINISTER FOR TRANSPORTATION ON LEGAL AFFAIRS AND BUREAUCRACY REFORM OF TRANSPORTATION	SENIOR ADVISOR TO THE MINISTER FOR TRANSPORTATION ON LEGAL AFFAIRS AND BUREAUCRACY REFORM OF TRANSPORTATION
STAF AHLI MENTERI BIDANG LOGISTIK, MULTIMODA DAN KESELAMATAN PERHUBUNGAN	OFFICE OF SENIOR ADVISOR TO THE MINISTER FOR TRANSPORTATION ON LOGISTIC, MULTIMODAL AND SAFETY OF TRANSPORTATION	SENIOR ADVISOR TO THE MINISTER FOR TRANSPORTATION ON LOGISTIC, MULTIMODAL AND SAFETY OF TRANSPORTATION
STAF AHLI MENTERI BIDANG EKONOMI KAWASAN DAN KEMITRAAN PERHUBUNGAN	OFFICE OF SENIOR ADVISOR TO THE MINISTER FOR TRANSPORTATION ON REGIONAL ECONOMY AND TRANSPORTATION PARTNERSHIP	SENIOR ADVISOR TO THE MINISTER FOR TRANSPORTATION ON REGIONAL ECONOMY AND TRANSPORTATION PARTNERSHIP

NOMENKLATUR		TITELATUR
INDONESIA	INGGRIS	
SEKRETARIAT JENDERAL	SECRETARIAT GENERAL	SECRETARY GENERAL
BIRO PERENCANAAN	BUREAU OF PLANNING	HEAD OF PLANNING BUREAU
BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI	BUREAU OF PERSONNEL AFFAIRS AND ORGANIZATION	HEAD OF PERSONNEL AFFAIRS AND ORGANIZATION BUREAU
BIRO KEUANGAN	BUREAU OF FINANCE	HEAD OF FINANCE BUREAU
BIRO HUKUM	BUREAU OF LEGAL AFFAIRS	HEAD OF LEGAL AFFAIRS BUREAU
BIRO UMUM	BUREAU OF GENERAL AFFAIRS	HEAD OF GENERAL AFFAIRS BUREAU
BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	BUREAU OF PUBLIC COMMUNICATION AND INFORMATION	HEAD OF PUBLIC COMMUNICATION AND INFORMATION BUREAU
BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA	BUREAU OF PROCUREMENT SERVICES AND STATE ASSET MANAGEMENT	HEAD OF PROCUREMENT SERVICES AND STATE ASSET MANAGEMENT BUREAU
PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PERHUBUNGAN	CENTER FOR INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) ON TRANSPORTATION	HEAD OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) CENTER ON TRANSPORTATION
PUSAT PENGELOLAAN TRANSPORTASI BERKELANJUTAN	CENTER FOR SUSTAINABLE TRANSPORTATION MANAGEMENT	HEAD OF SUSTAINABLE TRANSPORTATION MANAGEMENT CENTER
PUSAT FASILITASI KEMITRAAN DAN KELEMBAGAAN INTERNASIONAL	CENTER FOR PARTNERSHIP FACILITATION AND INTERNATIONAL ORGANIZATION	HEAD OF PARTNERSHIP FACILITATION AND INTERNATIONAL ORGANIZATION CENTER

NOMENKLATUR		TITELATUR
INDONESIA	INGGRIS	
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT	DIRECTORATE GENERAL OF LAND TRANSPORTATION	DIRECTOR GENERAL OF LAND TRANSPORTATION
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL	SECRETARIAT OF DIRECTORATE GENERAL	SECRETARY OF DIRECTORATE GENERAL
DIREKTORAT SARANA PERHUBUNGAN DARAT	DIRECTORATE OF LAND TRANSPORTATION MEANS	DIRECTOR OF LAND TRANSPORTATION MEANS
DIREKTORAT PRASARANA PERHUBUNGAN DARAT	DIRECTORATE OF LAND TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE	DIRECTOR OF LAND TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE
DIREKTORAT LALU LINTAS PERHUBUNGAN DARAT	DIRECTORATE OF LAND TRANSPORTATION TRAFFIC	DIRECTOR OF LAND TRANSPORTATION TRAFFIC
DIREKTORAT ANGKUTAN DAN MULTIMODA	DIRECTORATE OF ROAD AND MULTIMODAL TRANSPORT	DIRECTOR OF ROAD AND MULTIMODAL TRANSPORT
DIREKTORAT PEMBINAAN KESELAMATAN	DIRECTORATE OF ROAD SAFETY	DIRECTOR OF ROAD SAFETY

NOMENKLATUR		TITELATUR
INDONESIA	INGGRIS	
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT	DIRECTORATE GENERAL OF SEA TRANSPORTATION	DIRECTOR GENERAL OF SEA TRANSPORTATION
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL	SECRETARIAT OF DIRECTORATE GENERAL	SECRETARY OF DIRECTORATE GENERAL
DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT	DIRECTORATE OF SEA TRAFFIC AND TRANSPORT	DIRECTOR OF SEA TRAFFIC AND TRANSPORT
DIREKTORAT KEPELABUHANAN	DIRECTORATE OF PORT AFFAIRS	DIRECTOR OF PORT AFFAIRS
DIREKTORAT PERKAPALAN DAN KEPেলাUTAN	DIRECTORATE OF MARINE SAFETY AND SEAFARERS	DIRECTOR OF MARINE SAFETY AND SEAFARERS
DIREKTORAT KENAVIGASIAN	DIRECTORATE OF NAVIGATION	DIRECTOR OF NAVIGATION
DIREKTORAT KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI	DIRECTORATE OF SEA AND COAST GUARD	DIRECTOR OF SEA AND COAST GUARD

NOMENKLATUR		TITELATUR
INDONESIA	INGGRIS	
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA	DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION	DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL	SECRETARIAT OF DIRECTORATE GENERAL	SECRETARY OF DIRECTORATE GENERAL
DIREKTORAT ANGKUTAN UDARA	DIRECTORATE OF AIR TRANSPORT	DIRECTOR OF AIR TRANSPORT
DIREKTORAT BANDAR UDARA	DIRECTORATE OF AIRPORTS	DIRECTOR OF AIRPORTS
DIREKTORAT KEAMANAN PENERBANGAN	DIRECTORATE OF AVIATION SECURITY	DIRECTOR OF AVIATION SECURITY
DIREKTORAT NAVIGASI PENERBANGAN	DIRECTORATE OF AIR NAVIGATION	DIRECTOR OF AIR NAVIGATION
DIREKTORAT KELAIKUDARAAN DAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA	DIRECTORATE OF AIRWORTHINESS AND AIRCRAFT OPERATION	DIRECTOR OF AIRWORTHINESS AND AIRCRAFT OPERATION

NOMENKLATUR		TITELATUR	
INDONESIA	INGGRIS		
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	DIRECTORATE GENERAL OF RAILWAYS	DIRECTOR GENERAL OF RAILWAYS	
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL	SECRETARIAT OF DIRECTORATE GENERAL	SECRETARY OF DIRECTORATE GENERAL	
DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API	DIRECTORATE OF RAILWAYS TRAFFIC AND TRANSPORT	DIRECTOR OF RAILWAYS TRAFFIC AND TRANSPORT	
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN	DIRECTORATE OF RAILWAYS INFRASTRUCTURE	DIRECTOR OF RAILWAYS INFRASTRUCTURE	
DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN	DIRECTORATE OF RAILWAYS ROLLING STOCK	DIRECTOR OF RAILWAYS ROLLING STOCK	
DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN	DIRECTORATE OF RAILWAYS SAFETY	DIRECTOR OF RAILWAYS SAFETY	

NOMENKLATUR		TITELATUR
INDONESIA	INGGRIS	
INSPEKTORAT JENDERAL	INSPECTORATE GENERAL	INSPECTOR GENERAL
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL	SECRETARIAT OF INSPECTORATE GENERAL	SECRETARY OF INSPECTORATE GENERAL
INSPEKTORAT I	INSPECTORATE I	INSPECTOR I
INSPEKTORAT II	INSPECTORATE II	INSPECTOR II
INSPEKTORAT III	INSPECTORATE III	INSPECTOR III
INSPEKTORAT IV	INSPECTORATE IV	INSPECTOR IV
INSPEKTORAT V	INSPECTORATE V	INSPECTOR V

NOMENKLATUR		TITELATUR
INDONESIA	INGGRIS	
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN	AGENCY OF RESEARCH AND DEVELOPMENT ON TRANSPORTATION	HEAD OF RESEARCH AND DEVELOPMENT AGENCY ON TRANSPORTATION
SEKRETARIAT BADAN	SECRETARIAT OF AGENCY	SECRETARY OF AGENCY
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTARMODA	CENTER FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT ON INTERMODAL TRANSPORTATION	HEAD OF RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTER ON INTERMODAL TRANSPORTATION
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI JALAN DAN PERKERETAAPIAN	CENTER FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT ON ROAD TRANSPORTATION AND RAILWAYS	HEAD OF RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTER ON ROAD TRANSPORTATION AND RAILWAYS
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI LAUT, SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN	CENTER FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT ON SEA AND INLAND WATERWAYS TRANSPORTATION	HEAD OF RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTER ON SEA AND INLAND WATERWAYS TRANSPORTATION
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI UDARA	CENTER FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT ON CIVIL AVIATION	HEAD OF RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTER ON CIVIL AVIATION

NOMENKLATUR		TITELATUR
INDONESIA	INGGRIS	
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN	AGENCY OF HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT ON TRANSPORTATION	HEAD OF HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT AGENCY ON TRANSPORTATION
SEKRETARIAT BADAN	SECRETARIAT OF AGENCY	SECRETARY OF AGENCY
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN DARAT	CENTER FOR HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT ON LAND TRANSPORTATION	HEAD OF HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT CENTER ON LAND TRANSPORTATION
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN LAUT	CENTER FOR HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT ON SEA TRANSPORTATION	HEAD OF HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT CENTER ON SEA TRANSPORTATION
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN UDARA	CENTER FOR HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT ON CIVIL AVIATION	HEAD OF HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT CENTER ON CIVIL AVIATION
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PERHUBUNGAN	CENTER FOR HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT OF TRANSPORTATION APPARATUSES	HEAD OF HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT CENTER OF TRANSPORTATION APPARATUSES

NOMENKLATUR		TITELATUR
INDONESIA	INGGRIS	
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK	GREATER JAKARTA TRANSPORT AUTHORITY	HEAD OF GREATER JAKARTA TRANSPORT AUTHORITY
SEKRETARIAT BADAN	SECRETARIAT OF GREATER JAKARTA TRANSPORT AUTHORITY	SECRETARY OF GREATER JAKARTA TRANSPORT AUTHORITY
DIREKTORAT PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN	DIRECTORATE OF DEVELOPMENT AND PLANNING AFFAIRS	DIRECTOR OF DEVELOPMENT AND PLANNING AFFAIRS
DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	DIRECTORATE OF TRAFFIC AND TRANSPORT	DIRECTOR OF TRAFFIC AND TRANSPORT
DIREKTORAT PRASARANA	DIRECTORATE OF INFRASTRUCTURE	DIRECTOR OF INFRASTRUCTURE

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



ZAMRIJU EDJI H., SH, DESS
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19651022 199203 1 001